



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



LAPORAN KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2021



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bone

DR.H. A. SUMARDI SUAIB, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Isu Strategis.....	3
1.4 Struktur Organisasi	4
1.5 Sumber Daya Manusia.....	8
1.6 Sarana dan Prasarana Kantor	9
1.7 Sistematika Penulisan	12
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 14
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	18
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 20
3.1 Indikator Kinerja Utama.....	20
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja.....	23
3.3 Pengukuran Kinerja.....	24
3.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
 BAB IV PENUTUP.....	 41
 LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA(PK)	
LAMPIRAN 2 PENGUKURAN KINERJA	
LAMPIRAN 3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	
LAMPIRAN 4 RENCANA AKSI BADAN KESBANGPOL	
LAMPIRAN 5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	

BAB I PRNDAHULUAN

A. Umum

Penilaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap Instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi Instansi Pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKjIP tingkat SKPD disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKjIP juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

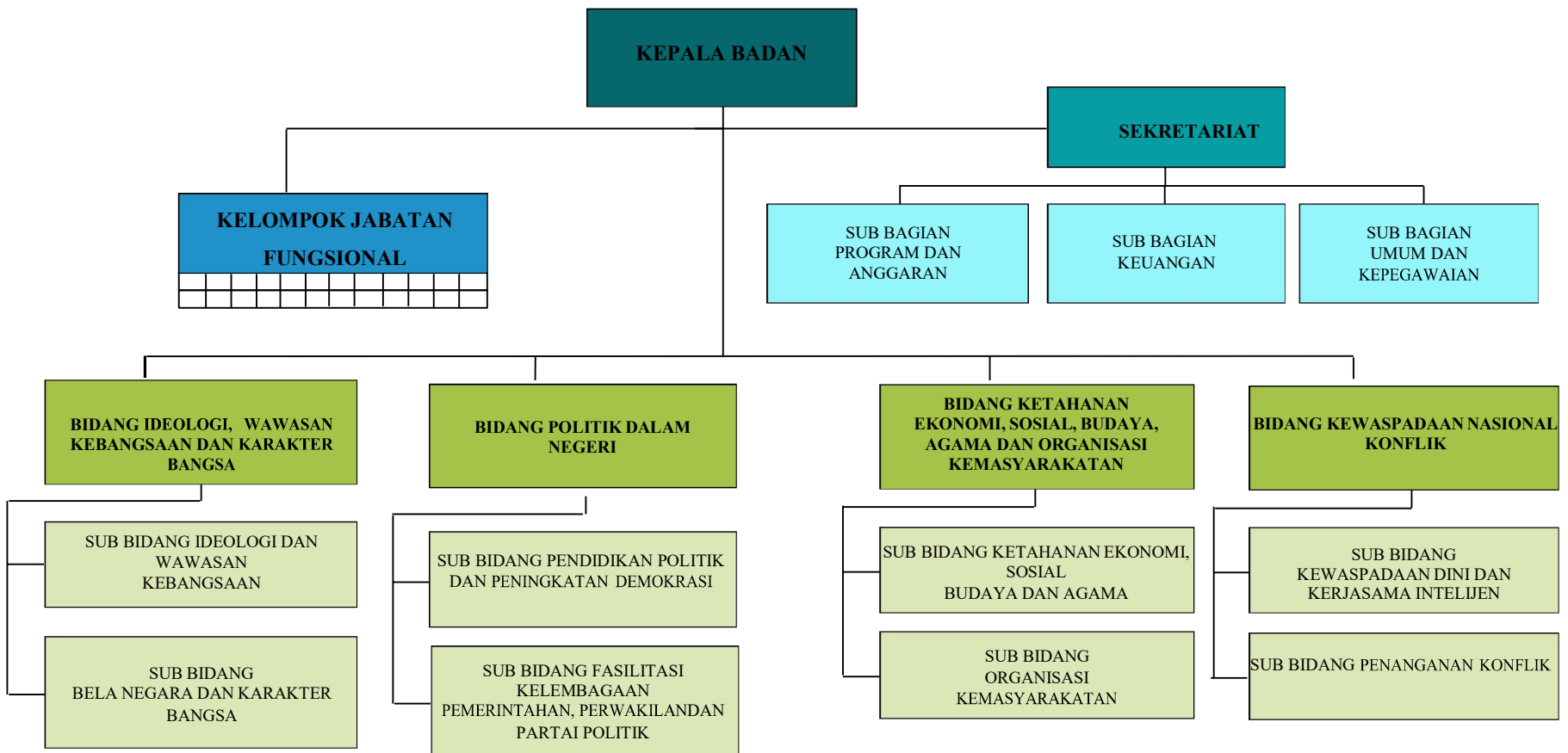
LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

B. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Badan kesatuan bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan Bangsa dan Politik berada pada aturan peralihan yang berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai – nilai kebangsaan, Organisasi Politik dan Kemasyarakatan dan Ketahanan Nasional.
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan Kesatuan Bangsa meliputi pengembangan nilai – nilai Kebangsaan, Organisasi Politik dan Kemasyarakatan serta Ketahanan Nasional.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Kesatuan Bangsa meliputi pengembangan nilai – nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan, serta ketahanan nasional
- d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone
(Perbup No. 54 Tahun 2019)



A. Sumber Daya Bakesbangpol Kabupaten Bone

Untuk menjalankan tugas dan fungsi nya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone di dukung oleh sejumlah sumber daya yang telah ada diantaranya sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resource) Bakesbangpol Kabupaten Bone merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan Pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023. Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat jabatan dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1.1

**Jumlah PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Bone Tahun 2021**

No.	Pangkat	Gol	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tk. 1	IV/b	-
3	Pembina	IV/a	6
4	Penata Tk. 1	III/d	7
5	Penata	III/c	5
6	Penata Muda Tk 1	III/b	-
7	Penata Muda	III/a	5
8	Pengatur Tk. 1	II/d	-
9	Pengatur	II/c	1
10	Pengatur Muda Tk. 1	II/b	-
11	Pengatur Muda	II/a	-

Sumber Data : DUK 2021 Bakesbangpol

C. Isu Strategis

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kabupaten Bone merupakan sasaran utama pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone guna pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sebagai bagian dari Rencana Strategis Pencapaian *Visi Misi Bupati*

Bone periode tahun 2018-2023, yaitu untuk mewujudkan *Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing, Dan Sejahtera*, banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek strategis berupa kekuatan dan kelemahan secara internal dan eksternal serta tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh organisasi.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tupoksi Organisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Belum memadai sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan khususnya bagi anggota KOMINDA.
- b. Belum adanya wadah formal untuk pengembangan wawasan kebangsaan skala lokal.
- c. Terbatasnya kemampuan SDM sehingga pendidikan politik tidak merata optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kebangsaan dalam rangka menghadapi globalisasi dan teknologi informasi yang tidak terbandung.
- d. Masih terbatasnya dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan Bela Negara.

D. Aspek Strategis Organisasi

Sistem Informasi Kesatuan Bangsa dan Politik (SIPPD)(<http://36.67.91.101:8123/sippd>) berfungsi sebagai system pendukung pemerintahan umum daerah. SIPPD ini telah terintegrasi dengan sistem penganggaran (SIKUDA). Keberadaan Sistem Informasi Perencanaan mampu mendukung system pemerintahan umumdi Kabupaten Bone, mulai tahapan penyusunan RKPD dan KUA-PPAS. Aplikasi ini sering mengalami pengembangan dari tahun ke tahun , yang secara otomatis berdampak terhadap peningkatan kualitas dokumen pemerintahan umum di Kabupaten Bone.

SIPD merupakan instrumen yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk digunakan secara nasional oleh pemerintah pusat maupun daerah. Instrumen ini telah mengintegrasikan tahapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi. Pemerintah Kabupaten Bone telah mengimplementasikan instrumen SIPD untuk semua perangkat daerah dalam penyusunan dokumen Perubahan RPJMD, Perubahan Renstra, RKPD dan KUA-PPAS.

Aplikasi **Si Ula** kemendagri merupakan instrument yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk digunakan secara nasional oleh pemerintah pusat maupun daerah. Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk setiap Ormas yang akan mendapatkan legalitas kelembagaannya.

BAB II PRNDAHULUAN

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran pada Renstra dan kaitannya dengan Misi Kabupaten

Tabel 2.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran			
			Pada Tahun Ke -			
			2020	2021	2022	2023
1	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	47%	52%	57%	62%
		Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	6,8	7,8	8,8	9,9
2	Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	B	B	BB	BB

Sumber Data: Renstra 2018 – 2023

B. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan, maka Strategi Bakesbangpol Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan tugas pemerintahan dan pembangunan .
2. Memfasilitasi terlaksananya pendidikan politik sehingga tercipta budaya politik demokratis dan berkesinambungan
3. Meningkatkan toleransi antar umat beragama, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Bone
4. Meningkatkan antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat

2. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merelisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Arah Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, yang secara khusus terkait dengan tugas pemerintahan umum atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah
2. Peningkatan pendidikan politik dan partisipasi politik masyarakat

3. Peningkatan toleransi antar umat beragama, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Bone
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara konsisten dan bertanggung jawab.
5. Alur keterkaitan dari rangkaian strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bakesbangpol Kabupaten Bone guna terwujudnya visi dan misi pembangunan Kabupaten Bone pada tahun 2018-2023, secara lengkap dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

VISI : Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan tugas pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan pelayanan masyarakat melalui peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah
MISI 6 : Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum dan seni budaya dalam kemajuan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan mengembangkan nilai - nilai kebangsaan	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Memfasilitasi terlaksananya pendidikan politik sehingga tercipta budaya politik demokratis dan berkesinambungan	Peningkatan pendidikan politik dan partisipasi politik masyarakat

	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Meningkatkan toleransi antar umat beragama, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bone	Peningkatan toleransi antar umat beragama, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Bone
--	--	---	--

Sumber Data: Renstra Bakesbangpol 2018-2023

C. Indikator Kinerja Utama

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

Tabel 2.3 IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET CAPAIATN SETIAP TAHUN			
				2020	2021	2022	2023
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	Persen	47%	52%	57%	62%
		Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	Pers.3en	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	Persen	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	Persen	6,8%	7,8%	8,8%	9,9%
	Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	Persen	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	Predikat	B	B	BB	BB

Sumber data: Renstra Bakesbangpol 2018-2023

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA

(RENJA) 2021, IKU dan APBD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan PK sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2021**

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan ya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	Persen	52	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemsayarakatan	789.035.600
	Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	Persen	100	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.429.273.805
Meningkatkan ya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	Persen	100	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	194.891.950
	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	Persen	7.8	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	237.800.250
Meningkatkan ya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	Persen	100	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.339.729.000
Meningkatkan ya akuntabilit	Predikat Evaluasi	Predikat	B	Program Penunjang Urusan	4.399.647.151

as kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	SAKIP pada APIP			Pemerintahan daerah Kabupaten /Kota	
				Jumlah	9.390.377.756

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Bakesbangpol Tahun 2021

(Menambahkan PK Kepala OPD Sampai Staf dengan kode barcode)

E. Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$X < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

BAB III AKUNTABILITAS

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Bone nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2021 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Bakesbangpol pada tahun 2021 dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meliputi :

Sasaran : 1. *Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan*

Indikator 1.1 Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif

1.2 Persentase orpol yang mendapatkan pembinaan

Sasaran 2 : Meningkatnya nilai – nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara

Indikator 2.1 Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif

2.2 Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara

Sasaran 3 : Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat

Indikator 3.1 Persentase Konflik Sosial yang Tertangani

Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik

Indikator 4.1 Predikat Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KET
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	Persen	52	61	117	Sangat tercapai/ sangat berhasil
	Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	Persen	100	80	80	Cukup berhasil
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	Persen	100	100	100	Tercapai /berhasil
	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	Persen	7.8	5,7	73	Cukup berhasil

Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	Persen	100	100	100	Tercapai /berhasil
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	Predikat	B	BB	BB	Sangat tercapai/ sangat berhasil
Rata – Rata					Tercapai/Berhasil	

Berdasarkan data diatas, Rata – rata hasil yang diperoleh dari Tujuan / Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Mencapai Target

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matriks sebagai berikut:

[illegible]

beragama dan bernegara	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	4,5	5,6	6,7	5,6	-	-	100	100	73	-	-
Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	CC	CC	BB	BB	BB	BB	B	BB	BB	BB	BB

Sumber Data : Laporan Realisasi Kinerja tahun 2021

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Persentase capaian sebesar 100% mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan persentase capaian realisasi sebesar 117%

Sasaran : 1. *Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan*

Indikator 1.1 Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif

1.2 Persentase orpol yang mendapatkan pembinaan

Sasaran :2. *Meningkatnya nilai – nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara*

Indikator 2.1 Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif

2.2 Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara

Sasaran :3. *Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat*

Indikator 3.1 Persentase Konflik Sosial yang Tertangani

Sasaran :4. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik*

Indikator 4.1 Predikat Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	25	25	47	61		
	Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	80	80	100	80		
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	80	80	100	100		
	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	4,5	5,6	6,7	5,6		
Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100	100	100	100		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	CC	CC	BB	BB		

Sumber Data: Laporan Evaluasi Kinerja

Berdasarkan tabel data di atas, dapat dijelaskan bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2020 ada yang telah mengalami peningkatan dan ada pula yang mengalami penurunan pada tahun 2021

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa dalam mengukur capaian kinerja tujuan/ sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal
/Standar Nasional Lainnya**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Standar Nasional	
				Target 2021	Realisasi 2021
1	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	-	-	-
		Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	-	-	-
2	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	-	-	-
		Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	-	-	-
3	Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	-	-	-
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	RATA - RATA CAPAIAN	PREDIKAT			
				>110	90=<s/d<110	60=<s/d<90	<60
				SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	117	117	√			
	Persentase orpol yang berpartrispasi aktif	80	80			√	
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	100	100		√		
	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	73	73		√		
Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100	100		√		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	BB	BB	√			

Sumber Data : Laporan Realisasi Evaluasi Kinerja

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 dalam kategori *Cukup Berhasil, Berhasil dan Sangat Berhasil.*

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1.1

Dari tabeldi atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dengan jumlah indikator kinerja 2 (dua) yang menunjukkan predikat *Berhasil dan Sangat Berhasil* yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata **100%**

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

@ Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif

Definisi: Menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan monitoring terhadap Ormas/LSM yang telah terdaftar dan tidak terdaftar sehingga dapat berpartisipasi secara aktif.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif dalam kategori *sangat berhasil*, yaitu tercapai **117%** dengan realisasi sebesar **61%** dari target **52%** hal ini karena:

1. Partisipasi Ormas / LSM yang aktif melakukan kegiatan dan melaporkan semua kegiatannya mencapai 74 Ormas/LSM dari 122 Ormas/LSM
2. Pelaksanaan Monitoring kepada semua Ormas/LSM yang ada di Kabupaten Bone.



Pencapaian di atas telah **melampaui target**, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Masih terdapat Ormas/LSM yang belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
2. Masih ada Ormas / LSM yang belum mampu menunjukkan surat domisi keberadaan sekretariat.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif antara lain:

1. Melakukan Sosialisasi “ Peningkatan ke Aktifan Ormas/LSM
2. Melakukan Sosialisasi tentang “Administrasi Bantuan Hibah Ormas”

@ Persentase orpol yang berpartisipasi aktif

Definisi: Menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Partai Politik yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Hibah Parpol.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase orpol yang berpartisipasi aktif dalam kategori *cukup berhasil*, yaitu tercapai **80%** dengan realisasi sebesar **80%** dari target **100%** hal ini karena:

1. Terdapat 15 Parpol yang terdaftar.
2. Parpol yang mendapatkan bantuan dana hibah hanya 12 parpol sehingga ada 3 parpol yang tidak aktif.





Pencapaian di atas **tidak mencapai target**, dikarenakan :

1. Masih terdapat Partai Politik yang tidak berpartisipasi aktif.
2. Masih terdapat Partai Politik yang tidak mendapatkan bantuan dana hibah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan Persentase orpol yang berpartisipasi aktif antara lain:

1. Melaksanakan Bimbingan Tekhnis terkait Bantuan Dana Hibah Parpol
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Administrasi Bantuan Dana Hibah Parpol.

Sasaran 2

Dari tabeldi atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara dengan jumlah indikator kinerja 2 (dua) yang menunjukkan predikat **Berhasil dan Cukup Berhasil** yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata **100%**.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

@ Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif

Definisi: Menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Etnis di Kabupaten Bone.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator **Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif** dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai *100%* dengan realisasi sebesar *100%* dari target *100%* hal ini karena Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpol bersinergi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Lembaga Keagamaan yang terbentuk Forum Kerukunan antar Umat Beragama.



Pencapaian di atas telah *mencapai target*, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya adalah *Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini*.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik untuk meningkatkan Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif dengan *Melakukan rapat koordinasi dengan FKUB*

@ Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara

Definisi: Menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan pendataan dan pembinaan terhadap Aparat yang telah mengikuti Pelatihan Bela Negara.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan

Bela Negara dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai *73%* dengan realisasi sebesar *73%* dari target *73%* hal ini karena:

1. Seluruh Aparat yang telah mengikuti Pelatihan Bela Negara telah dinyatakan lulus dengan mendapatkan sertifikat dari tim pelatih.
2. Seluruh Aparat memiliki antusias yang luar biasa terkait Pelatihan bela Negara



Pencapaian di atas *mencapai target*, dikarenakan :

1. Aparatur dan LSM berpartisipasi aktif dalam mengikuti Pelatihan Bela Negara
- 2.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara antara lain:

1. Melaksanakan Pendidikan Bela Negara goes to school
2. Melaksanakan Pelatihan Bela Negara.

Sasaran 3

Dari tabeldi atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan jumlah indikator kinerja 1 yang menunjukkan predikat *Berhasil* yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata *100%*.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

@ Persentase Konflik sosial yang tertangani

Definisi: Menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Forkopimda, Forkopimcam dan anggota KOMINDA, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam menangani Konflik Sosial di Kabupaten Bone .

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator **Persentase Konflik sosial yang tertangani** dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% hal ini karena:

1. Terlaksananya rapat koordinasi dan sinergitas antara Forkopimda Bersama stakeholder terkait dalam membahas permasalahan yang terjadi dan yang akan terjadi.
2. Terlaksananya rapat koordinasi dengan anggota KOMINDA.
3. Terlaksananya rapat koordinasi Forkopimda Bersama Forkopimcam dalam pembahasan permasalahan permasalahan di daerah.



Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Masih kurangnya prasarana dalam pelaksanaan monitoring ke desa desa terpencil dalam hal menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
2. Terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan koordinasi tersebut.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik untuk meningkatkan **Persentase Konflik sosial yang tertangani** .

1. Melakukan Koordinasi dan sinergitas antara Forkopimda, Forkopimcam dan KOMINDA serta Tokoh Agama dan Toko Masyarakat
2. Melakukan Rapat – Rapat Internal dengan Staceholder terkait.

Sasaran 4

Dari tabeldi atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik dengan jumlah indikator kinerja 1 yang menunjukkan predikat Sangat *Berhasil* yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

@ Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP

Definisi: Menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan perbaikan laporan akuntabilitas yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Bone.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP dalam kategori *Sangat berhasil*, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% hal ini karena:

1. Tersedianya data yang dibutuhkan oleh tiim Audit Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja
2. Tersajinya laporan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Koordinasi dan asistensi dengan semua Perangkat Daerah



Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai
2. Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pelaporan kinerja pemerintah

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik untuk meningkatkan Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP.

1. Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan lebih baik lagi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh anggaran dapat direalisasikan
2. Perlu adanya penyeragaman pandangan terhadap regulasi yang digunakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di daerah;
3. Diklat – diklat perlu diperbanyak sehingga SDM yang berkompetensi dapat diwujudkan

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

Tabel 3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI SUMBER DAYA
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	%
a	b	c	d	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	52	61	117	789,035,600	591,418,800	75	42
	Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	100	80	80	1,429,273,805	1,417,673,355	99	19
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	100	100	100	194,891,950	178,034,650	91	9
	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	6.8	5.7	74	237,800,250	207,572,450	87	-3
Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100	100	100	2,339,729,000	1,909,538,700	82	18
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	BB	BB	BB	4,399,647,151	4,081,505,206	93	Efisien

Sumber Data : Realisasi Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan hasil Analisa efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu :

1. Indikator Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif dengan capaian kinerja 117% dan capaian anggaran 75% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 25% dan efisiensi sumber daya sebesar 42 %.
2. Indikator Persentase orpol yang berpartisipasi aktif dengan capaian kinerja 80% dan capaian anggaran 99% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 19% dan efisiensi sumber daya sebesar 19 %.
3. Indikator Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 91% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 91% dan efisiensi sumber daya sebesar 9 %.
4. Indikator Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara dengan capaian kinerja 74% dan capaian anggaran 87% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 87% dan efisiensi sumber daya sebesar -3%.
5. Indikator Persentase Konflik sosial yang tertangani dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 82% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 82% dan efisiensi sumber daya sebesar 18%.
6. Indikator Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 100% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 93% dan efisiensi sumber daya sebesar 7%.

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.6 Analisis Program /Kegiatan /Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif							
		Persentase orpol yang berpartisipasi aktif							
	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif							
		Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara							

2	Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani							
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan realiasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	%	100	83	100	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bakesbangpol Yang Tersusun	%	100	83	83	
			SUB KEGIATAN						
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Bakesbangpol yang tersusun (dokumen)	Dokumen	5	4	80	
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Bakesbangpol yang tersusun (dokumen)	Dokumen	2	2	100	
			3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Bakesbangpol yang tersusun (dokumen)	Dokumen	1	1	100	

		4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Bakesbangpol yang tersusun (dokumen)	Dokumen	1	1	100	
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Bakesbangpol yang tersusun (dokumen)	Dokumen	3	2	67	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	
		SUB KEGIATAN						
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN (kali)	Kali	14	14	100	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparat Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	%	100	50	50	
		SUB KEGIATAN						
		1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparat yang ikutserta dalam Diklat/Bimtek Pembentukan/Penjenjangan Ahli dan Pengembangan Profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan (aparatus)	ASN	2	1	50	

		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	
		SUB KEGIATAN						
		1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	Paket	12	12	100	
		2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (paket)	Paket	12	12	100	
		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	Paket	12	12	100	
		4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan (paket)	Paket	12	12	100	
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Aparat Bakesbangpol dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (Kali)	Kali	500	482	96	

		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	94	94	
		SUB KEGIATAN						
		1. Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeleu Kantor sesuai rencana kebutuhan (unit)	Unit	45	25	56	
		2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan (unit)	Unit	40	55	138	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	%	100	100	100	
		SUB KEGIATAN						
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan (Rekening)	Rekening	48	48	100	
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	Bulan	12	12	100	

			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	100	100	
			SUB KEGIATAN						
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan (unit)	Kegiatan	17	17	100	
			2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan(paket)	Paket	1	1	100	
2			PROGRAM : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama	%	100	100	100	diharapkan kedepannya kegiatan ini dapat terlaksana setelah pandemi covid-19 berakhir
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Hasil Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	%	100	100	100	
			SUB KEGIATAN						

		1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4	4	100	
		2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1	1	100	
		3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1	1	100	
		4. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1	1	100	

3			PROGRAM : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase Orpol yang ikut serta dalam Program Peningkatan Peran Partai Politik Dalam Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	%	100	100	100	
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	%	100	100	100	
			SUB KEGIATAN						
			1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	2	2	100	

			2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Laporan	1	1	100	
			2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Laporan	1	1	100	
			PROGRAM : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas dan Orpol yang mendapatkan pembinaan	%	100	100	100	diharapkan kedepannya ormas bisa diberikan sosialisasi terkait kelengkapan berkas permohonan dana bantuan hibah
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100	100	100	
			SUB KEGIATAN						

			1. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1	1	100	
			PROGRAM: PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	%	100	100	100	
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	100	100	
			SUB KEGIATAN						
			1.Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4	4	100	

			2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4	4	100	
4			PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (%)	%	100	74	74	dlharapkan kedepannya kegiatan ini dapat terlaksana setelah pandemi covid-19 berakhir
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	%	100	74	74	
			SUB KEGIATAN						
			1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	1	1	100	

		2. Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	1	1	100	
		3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	1	1	100	

			4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	27	16	59	
			5. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100	

Sumber Data : Laporan Kinerja Pemerintah

Upaya Perbaikan Berikutnya

- Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan lebih baik lagi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh anggaran dapat direalisasikan;
- Komunikasi dan koordinasi antar pemegang puncak pimpinan perlu ditingkatkan sehingga gangguan dari kebijakan politik dapat ditekan sekecil-kecilnya;
- Perlu adanya penyeragaman pandangan terhadap regulasi yang digunakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di daerah;
- Diklat – diklat perlu diperbanyak sehingga SDM yang berkompetensi dapat diwujudkan.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar **Rp. 9. 390. 377.756** (Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

TabelRealisasi Anggaran

URAIAN	JUMLAH		PERSEN
	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol			
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara			
Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat berbasis teknologi informasi			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik			
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	789,035,600	591,418,800	75
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,429,273,805	1,417,673,355	99
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	194,891,950	178,034,650	91
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kerbangsaan	237,800,250	207,572,450	87
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2,339,729,000	1,909,538,700	82

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone	4,399,647,151	4,081,505,206	93
TOTAL	9,390,377,756	8,385,743,161	89%



BAB V PENUTUP

A. Simpulan Umum

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone juga menjadi makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA Bakesbangpol. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2021 adalah **Berhasil**, karena ada dua indikator memenuhi kriteria **Sangat Berhasil**, ada dua indikator memenuhi kriteria **Berhasil** dan dua indikator memenuhi **Cukup Berhasil**.

B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan

penetapan kinerja tahunan dan juga sebagai bagian dari kebijakan strategis daerah, khususnya dalam RENSTRA dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan Sub Kegiatan, alokasi anggarannya, juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan dan Sub. Kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk pelayanan yang memperoleh beberapa penghargaan oleh Pemerintah.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone ke depan. Dalam meningkatkan layanan urusan pemerintah daerah. Bagi instansi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, serta pelayanan ditahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 merupakan laporan tahunan. Berdasarkan masalah dan isu strategis untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance serta meningkatkan kinerja Bakesbangpol Kab. Bone dimasa akan datang, perlu dirumuskan bersama indikator sasaran yang menjadi tolak ukur kinerja dalam

melaksanakan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kab. Bone priode tahun 2018-2023.

Lampiran :

- 1). Matriks Renstra (barcode)
- 2). Cascading Kinerja(barcode)
- 3). Perjanjian Kinerja(barcode)
- 4). Ringkasan Pengukuran Kinerja(barcode)
- 5). Penghargaan
- 6). Inovasi
- 7). Lampiran lainnya, dll.